

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Bima Lintang Anggoro, Lutfian Ubaidillah,SH.,MH

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

Jln. Karimata 49 Jember, 48124

**E-mail:** bimabima013@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Indonesia disebut dengan Negara Agraris dengan luas wilayah laut yang luas memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar salah satunya lobster. Penangkapan lobster secara tidak terkontrol merupakan tindakan yang bersifat eksploitasi dan mendekati kondisi yang memprihatinkan bagi kelestarian biota Lobster. Penelitian ini bertujuan mengetahui arah yang pasti mulai dari penangkapan lobster yang tepat dengan mempertimbangkan usia hingga aturan yang menjadi dasar dari ekspor lobster hingga Kedudukan hukum dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa aturan serta kedudukan hukum tentang lobster terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan.

**Kata Kunci:** Lobster, Kedudukan Hukum, Peraturan Menteri

---

## **ABSTRACT**

*Indonesia is called an agricultural country with a large marine area that has a very large diversity of marine and fishery resources, one of which is lobster. Uncontrolled lobster catching is an exploitative action and approaches a condition of concern for the sustainability of Lobster biota. This study aims to determine a definite direction starting from the right lobster catch by considering age to the rules that form the basis of lobster exports to the legal position of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. The results of the analysis show that the rules and legal position regarding lobster are contained in the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 12 of 2020 concerning the management of lobsters, crabs, and crabs*

***Keywords:*** **Lobster, Legal Position, Ministerial Regulation.**

---